

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ini mencakup perencanaan jangka panjang yang melibatkan berbagai sektor untuk mencapai pertumbuhan dan distribusi yang merata guna meningkatkan kualitas dan memajukan bangsa. Pembangunan nasional bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan sosial. Pembangunan ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti infrastruktur, tetapi juga meliputi upaya peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Strategi implementasi pembangunan nasional di Indonesia, misalnya, ditekankan pada kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan di sektor kesehatan yang dilaksanakan dengan baik merupakan faktor penting untuk eskalasi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan sektor kesehatan di Indonesia memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan segala bentuk tanggung jawabnya ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasilitasi pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sampai dengan sistem sinkronisasi penguatan kesehatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permasalahan gizi merupakan satu dari sekian banyaknya permasalahan di sektor kesehatan yang sampai saat ini menjadi perhatian utama dari pemerintah. Permasalahan gizi ini tentu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi di beberapa negara lain, sehingga permasalahan ini dikategorikan sebagai masalah global.

World Health Organization (WHO) melaporkan, pada tahun 2022 malnutrisi merupakan permasalahan gizi yang kerap kali timbul. Malnutrisi tersebut mencakup *stunting*, *wasting*, dan *overweight*. Berdasarkan catatan *Global Nutrition Report* pada tahun 2020 terdapat 149, 2 juta (22,2%) anak di bawah lima tahun menderita *stunting*, sebanyak 45,4 juta (6,7%) balita menderita *wasting*, dan 38,9 juta (5,7%) balita menderita *overweight*, jumlah tersebut merupakan jumlah kejadian global. Di Indonesia berdasarkan pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi status gizi balita mengalami *stunting* (24,4%), *wasting* (7,1%), dan *overweight* (3,5%).

Gambar 1. 1 Status Gizi Balita Global dan Indonesia Tahun 2021



Sumber: Global Nutrition Report dan Hasil SSGI, 2021

Menurut laporan hasil *Global Nutrition Report* dan SSGI tersebut dapat diketahui bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia lebih tinggi dari prevalensi secara global dengan selisih 2,2%. Begitu juga dengan angka kejadian *wasting* yang lebih

tinggi Indonesia dibandingkan dengan prevalensi global dengan selisih 0,4%, sedangkan prevalensi *overweight* Indonesia lebih rendah dari prevalensi global dengan selisih 1,9%. Dari ketiga permasalahan gizi di atas, masalah gizi yang dominan terjadi dengan angka yang tinggi sampai saat ini adalah *stunting* baik di dunia maupun Indonesia.

Stunting merupakan suatu kondisi dimana tinggi badan seorang anak berada di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan anak lain pada usia yang sama. Menurut WHO tidak semua balita yang pendek itu dikatakan *stunting*, pendek yang dikatakan *stunting* jika ada selisih angka antara tinggi badan berdasarkan usianya dengan kurva pertumbuhan WHO terjadi karena nutrisi tidak baik dan infeksi akut yang terjadi dalam 1.000 HPK *stunting* menyebabkan pertumbuhan fisik, pertumbuhan organ, dan otak jadi terhambat. Bukan hanya memengaruhi tinggi badan, *stunting* juga dapat berimbas kepada kemampuan kognitif pada anak (Pakaya et al., 2023).

Selain itu kondisi lingkungan yang menjadi intervensi sensitif adanya *stunting* karena akses terhadap air yang dikonsumsi dan sanitasi yang buruk, lingkungan yang kurang higienis, serta kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai dapat memperburuk masalah gizi sehingga meningkatkan risiko *stunting* pada anak-anak. Kondisi juga kemiskinan memiliki dampak dalam keterbatasan akses terhadap sumber daya yang esensial guna pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pendidikan dan nutrisi yang mereka peroleh (Chairunnisa, 2024)

Berdasarkan data WHO yang diambil dari laporan *Global Nutrition Report* tahun 2020 di atas, di mana 22,2% anak di bawah usia 5 tahun (sekitar 149,2 juta) di seluruh dunia mengalami *stunting*, dari angka tersebut Distribusi Regional *stunting* diseluruh wilayah dunia Asia menyumbang sekitar 55% dari seluruh kasus *stunting* dunia dengan prevalensi tertinggi di Asia Selatan. Afrika menyumbang sekitar 40% kasus global, terutama di wilayah Afrika Sub-Sahara. Sementara untuk Eropa dan Amerika Utara prevalensi *stunting* relatif rendah karena sistem gizi dan kesehatan yang lebih baik.

Menurut *Asian Development Bank*, prevalensi *stunting* di Asia Tenggara menunjukkan variasi yang signifikan antar negara, data pada tahun 2020 mencatat Timor Leste 48,8% tingkat *stunting* tertinggi di kawasan ini, Indonesia 31,8% di peringkat kedua, Laos 30,2% , Kamboja 29,9%, Filipina 28,7%, Malaysia 20,9%, Brunei 12,7%, Thailand 12,3% dan Singapura 2,8% tingkat terendah *stunting* di kawasan ini. Menyoroti data ini, maka kebutuhan mendesak untuk intervensi kesehatan dan gizi secara menyeluruh untuk mengatasi masalah *stunting*. Menjadi fokus pemerintah untuk melakukan upaya-upaya seperti program peningkatan gizi ibu sebelum dan selama hamil, peningkatan gizi anak usia dini, perbaikan sanitasi, perbaikan akses ke layanan kesehatan dasar untuk menurunkan angka *stunting*

Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2015-2030 yang tercantum pada nomor 3, yaitu menjamin kehidupan sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, maka *stunting* perlu dicegah dengan berbagai upaya. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang menyatakan bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas, dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan pemangku kepentingan.

Provinsi Jawa Timur dengan populasi penduduk yang sangat besar, berdasarkan *Survey Status Gizi Indonesia* (SSGI) tahun 2022 angka prevalensi *stunting* nya berada di 19,2%, sedangkan target nasional di tahun 2024 *stunting* harus turun ke angka 14%. Sehingga juga menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan *stunting* dan penurunan kemiskinan ekstrim. Angka *stunting* di Jawa Timur tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah kesehatan ibu, bayi, remaja, dan juga masih adanya perkawinan anak. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian dan pencegahan yang efektif (Kemenko PMK, 2022).

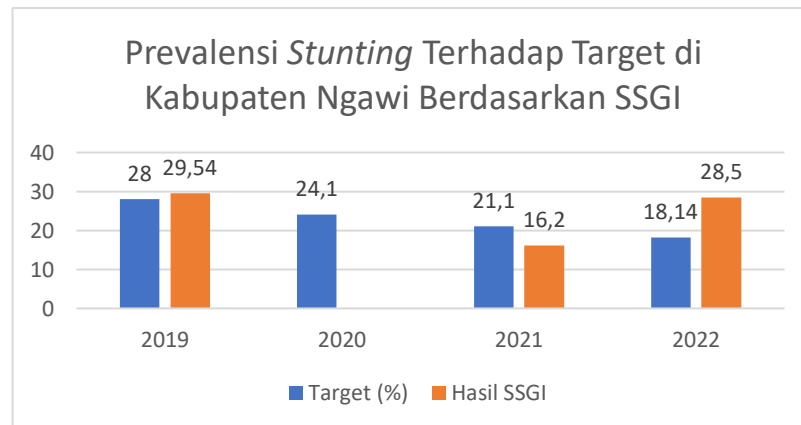
Tabel 1. 1 Prevalensi Balita *Stunting* Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	ANGKA PREVALENSI <i>STUNTING</i>
KABUPATEN JEMBER	34,9
KABUPATEN BONDOWOSO	32
KABUPATEN SITUBONDO	30,9
KABUPATEN NGAWI	28,5
KABUPATEN LAMONGAN	27,5
KABUPATEN BANGKALAN	26,2
KOTA BATU	25,2
KABUPATEN TUBAN	24,9
KABUPATEN BOJONEGORO	24,3

Sumber: (BPS Jawa Timur, 2023)

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi merupakan salah satu wilayah dengan angka prevalensi balita *stunting* 28,5% yang sangat tinggi dan jauh dari rata-rata prevalensi Provinsi Jawa Timur yang berada di 19,2%. Sementara dari angka prevalensi balita *stunting* Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten/kota berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia untuk Kabupaten Ngawi dari tahun 2019 sampai dengan 2022 tergambar sebagai berikut di bawah ini:

Tabel 1. 2 Prevalensi *Stunting* Terhadap Target di Kabupaten Ngawi Tahun 2019-2022 Berdasarkan SSGI



Sumber: Hasil SSGI (diolah peneliti, 2024)

Tahun 2019 prevalensi *stunting* kabupaten Ngawi 29,54%, tahun 2020 (tidak dilakukan survei karena Covid-19), tahun 2021 prevalensi 16,2% dan ditahun 2022 28,5%. Dari data di atas terlihat bahwa tahun 2021 telah terdapat penurunan dari tahun 2019 yang semula 29,54% menjadi 16,2%. Tahun 2022 angka prevalensi untuk Kabupaten Ngawi naik kembali menjadi 28,5% maka upaya penanganan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Ngawi ini juga menjadi fokus prioritas juga. Walaupun secara angka prevalensi menempati urutan keempat di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki tanggung jawab dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, untuk menjalankan pemenuhan tanggung jawab dan komitmen tersebut. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4.A Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Ngawi. Dikeluarkannya peraturan

tersebut juga merupakan akibat dari prevalensi *stunting* yang tinggi di tahun 2019 sebesar 29,54% di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Tabel 1. 3 Desa/Kelurahan Lokus *Stunting* di Kabupaten Ngawi Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Anak <i>Stunting</i>	Prevalensi <i>Stunting</i>
1	Ngawi	Margomulyo	106	37,46
2	Bringin	Sumberbening	80	21,05
3	Geneng	Tepas	73	19,06
4	Karanganyar	Pandean	58	14,76
5	Karangjati	Sidorejo	58	16,29
6	Kasreman	Tawun	55	22,09
7	Kedunggalar	Katikan	50	25,00
8	Kendal	Karanggupito	47	16,04
9	Ngrambe	Cepoko	39	14,55
10	Padas	Tambakromo	36	14,12

Sumber: DP3AKB Kabupaten Ngawi 2023 (diolah peneliti, 2024)

Kelurahan Margomulyo merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ngawi yang merupakan Ibukota Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data di atas Kelurahan Margomulyo memiliki jumlah anak *stunting* sebanyak 106 anak dan prevalensinya mencapai 37,46%. Tingginya kasus *stunting* yang terjadi di Kelurahan Margomulyo ini merupakan permasalahan yang krusial mengingat letak Kelurahan Margomulyo yang berada di tengah-tengah Ibukota Kabupaten Ngawi, yakni Kecamatan Ngawi sehingga sudah seharusnya dapat menjadi percontohan yang baik bagi kelurahan lainnya.

Tingginya jumlah balita yang menderita *Stunting* di Kelurahan Margomulyo disebabkan karena adanya persoalan masih belum meratanya pengetahuan para

orang tua khususnya ibu yang memiliki balita mengenai pentingnya gizi dan balita tidak diperhatikan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Ngawi, melakukan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi, hal ini sebagai upaya dalam pemenuhan target nasional sebesar 14% di Tahun 2024 dan upaya meningkatkan pemantauan kualitas gizi balita serta memperkuat peran dan fungsi posyandu di setiap desa dan kelurahan.

Pemerintah setempat berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penurunan *stunting*, maka diperlukan kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan *stunting*, penyediaan akses yang mudah bagi ibu hamil dan anak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan gizi, dan peningkatan kerja sama antar sektor untuk mendukung upaya pencegahan *stunting* di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Ngawi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor program kegiatan.

Beberapa pendekatan yang dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dengan sasaran 1000 (seribu) Hari Pertama Kelahiran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui serta anak usia 0-23 bulan dan usia lainnya, yaitu remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24-59 bulan. Sedangkan, untuk intervensi gizi sensitif ialah dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Ngawi meliputi kemandirian

keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, dan posyandu. Hal ini yang mendukung penulis tertarik untuk mengkaji **“Implementasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi”** mengacu pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4.A Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dan analisis faktor pendorong dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan menggunakan pendekatan *top-down* menurut Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana, dan lingkungan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Ngawi menjadi kabupaten dengan prevalensi tertinggi keempat di Provinsi Jawa Timur;
2. Tahun 2022 angka prevalensi untuk Kabupaten Ngawi naik tajam menjadi 28,5% dibanding tahun sebelumnya; dan
3. Jumlah balita *stunting* di Kelurahan Margomulyo pada tahun 2023 mencapai total 106 balita dengan prevalensi sebesar 37,46% dan masuk dalam kelurahan lokus *stunting* di Kabupaten Ngawi.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang dan hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi; dan
2. Menjelaskan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat terhadap pengetahuan bagi perkembangan dan kemajuan Ilmu Adminitrasi Publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai analisis terhadap implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi. Di samping itu, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti terhadap fenomena yang terjadi saat ini.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya, yaitu di bidang Administrasi Publik melalui analisis terhadap implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi, serta memberikan masukan terhadap pemerintah sebagai pengelola kebijakan agar dapat diimplementasikan sesuai dengan yang seharusnya.

3) Bagi Masyarakat

- a. Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak terkait, untuk perbaikan ke arah yang lebih baik; dan
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi untuk peneliti berikutnya.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Nama Jurnal dan Tahun	Tujuan	Metode	Teori	Hasil Temuan	Perbedaan Penelitian
1.	Nama Peneliti: Hadi Supriyanto dan Azhar Abdul Rahman Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Nama Jurnal: Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2 No. 2 Tahun: 2023 (Supriyanto & Rahman. 2023)	Menganalisis sejauh mana implementasi penurunan <i>stunting</i> telah dilakukan di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.	Deskriptif Kualitatif	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007): a. Standar dan Sasaran Kebijakan; b. Sumber Daya; c. Komunikasi; d. Karakteristik Organisasi Pelaksana; e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik; dan f. Disposisi Pelaksana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penurunan <i>stunting</i> di Kecamatan Salem masih belum memadai karena strategi yang digunakan oleh pelaksana masih belum optimal, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi penghambat dalam penerapan implementasi penurunan <i>stunting</i> di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.	Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan gabungan dari beberapa teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, Lineberry dan Lester & Stewart yang dikerucutkan meliputi tujuan kebijakan, sasaran kebijakan dan prosedur kebijakan.
2.	Nama Peneliti: Amaliah Chairunnisa, Endang Larasati dan Dyah Lituhayu	Menganalisis implementasi kebijakan	Deskriptif Kualitatif	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007):	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah	Penelitian terdahulu membahas mengenai fokus kampanye dan sosialisasi untuk mencegah

	Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Kecamatan Brebes Nama Jurnal: <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> Vol. 13 No. 4 Tahun: 2024 (Chairunnisa, dkk, 2024)	pengendalian <i>stunting</i> di Kabupaten Brebes.		a. Standar dan Sasaran Kebijakan; b. Sumber Daya; c. Komunikasi; d. Karakteristik Organisasi Pelaksana; e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik; dan f. Disposisi Pelaksana.	menjalankan tugasnya dengan baik, mulai dari penyuluhan gizi hingga program intervensi. Namun, masih terdapat tantangan yang cukup signifikan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan <i>stunting</i> , meskipun kampanye dan sosialisasi telah dilakukan.	<i>Stunting</i> di satu kecamatan, sementara penelitian yang akan dilakukan memfokuskan percepatan penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> di satu kelurahan, yakni Kelurahan Margomulyo untuk melihat ketercapaian tujuan yang lebih mendalam.
3.	Nama Peneliti: Qotrun Nada Sahroji, Rahmat Hidayat, dan Rudyk Nababan Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Penanganan <i>Stunting</i> di Kabupaten Karawang Nama Jurnal: Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 7 No. 1 Tahun: 2022 (Sahroji, dkk. 2022)	Menjelaskan mengenai implementasi kebijakan Dinas Kesehatan di Kabupaten Karawang dalam menangani <i>stunting</i> .	Deskriptif Kualitatif	Teori Implementasi Tachjan (Tachjan, 2006): a. Unsur Pelaksana; b. Program yang Dilaksanakan; dan c. Kelompok Sasaran.	Hasil dari penelitian ini ialah implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal, disebabkan masih terdapat program-program yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang.	Penelitian ini memiliki fokus mengenai implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang berpengaruh ke banyak pihak khususnya yang meliputi pemegang kepentingan <i>stunting</i> , sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan melihat dari beberapa OPD di wilayah terkait, salah satunya DP3AKB. Penelitian terdahulu juga menggunakan teori implementasi yang mengemukakan mengenai unsur pelaksana, program yang dilaksanakan dan kelompok

						sasaran, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan melihat dari tujuan, sasaran dan prosedur kebijakan.
4.	Nama Peneliti: Dian Rosa Sunaryo Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Kabupaten Bandung Nama Jurnal: Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 4 Tahun: 2021 (Sunaryo, 2021)	Menganalisis pelaksanaan kebijakan dalam penanganan <i>stunting</i> pada masa pandemi Covid-19	Deskriptif Kualitatif	Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Paul A. Sabatier : a. Karakteristik Masalah; b. Karakteristik Kebijakan; dan c. Variabel Lingkungan Kebijakan.	Hasil penelitian menunjukkan penanganan permasalahan <i>stunting</i> di Kabupaten Bandung belum berjalan optimal karena aspek sumber daya yang harus melalui <i>refocusing problem</i> akibat pandemi Covid-19 sehingga perlu dilakukan peningkatan pengetahuan mengenai pemahaman kebijakan <i>stunting</i>.	Penelitian ini membahas mengenai penanganan <i>stunting</i> di masa pandemi <i>Covid-19</i> dengan fokus utama aspek sumber daya yang harus melalui kondisi <i>refocusing</i>. Penelitian yang akan dilaksanakan membahas cakupan aspek secara menyeluruh berdasarkan gabungan beberapa teori setelah pandemi <i>Covid-19</i>.
5.	Nama Peneliti: Yeni Widyastuti, Arenawati dan Nikki Prafitri Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Desa Singasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Nama Jurnal: JIPAGS Vol. 6 No. 2	Menganalisis implementasi kebijakan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> di tingkat desa melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Desa Sindangsari,	Deskriptif Kualitatif	Identifikasi Fase Implementasi (Tansella & Thornicroft, 2009): a. <i>Adoption in Principle</i>; b. <i>Early Implementation</i>; dan c. <i>Persistence of Implementation</i>.	Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> memerlukan upaya sinergis dari berbagai pihak. Program Rumah Desa Sehat (RDS) merupakan salah satu bentuk kewenangan desa yang berlandaskan kepada hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal	Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang terdiri dari pengadopsian prinsip-prinsip, awal implementasi, dan keberlanjutan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori oleh gabungan Jones, Lineberry dan Lester & Stewart dalam kebijakan penanganan <i>stunting</i>.

	Tahun: 2022 (Widyastuti, dkk, 2022)	Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang			sehingga harus didayagunakan dan dioptimalisasi melalui sumber daya yang dimiliki oleh desa.	
6.	Nama Peneliti: Yusnan Pakaya, Sunarto Kadir dan Vivien Karim Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif dalam Penanganan <i>Stunting</i> di Kabupaten Gorontalo Nama Jurnal: JPHI Vol. 15 No. 2 Tahun: 2023 (Pakaya, dkk. 2023)	Mengetahui implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan <i>stunting</i> di Kabupaten Gorontalo	Deskriptif Kualitatif	Model Implementasi Kebijakan Edward III (Edward, 1980): a. Komunikasi; b. Sumber Daya; c. Disposisi; dan d. Struktur Birokrasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan keseluruhan variabel dari model implementasi kebijakan Edward III yang menjadi aspek utama dalam kebijakan intervensi gizi sensitif di Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga masih diperlukan peningkatan pada faktor internal, yaitu konsistensi dengan OPD terkait.	Penelitian ini menggunakan teori model implementasi sebagai konsep utama dalam mengimplementasikan kebijakan intervensi gizi sensitif, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan memiliki kerangka pikir dimana dasar dari peraturan yang melandasi implementasi merupakan konsep utamanya.
7.	Nama Peneliti: Falentina Kiranasari Judul Penelitian: Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> pada Dinas Keluarga	Deskriptif Kualitatif	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007): a. Standar dan Sasaran Kebijakan; b. Sumber Daya; c. Komunikasi;	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa angka prevalensi <i>stunting</i> di Kabupaten Sintang menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan	Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan fokus hanya pada satu OPD, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori dari gabungan beberapa

	Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Nama Jurnal: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah Vol. 6 No. 2 Tahun: 2024 (Kiranasari, 2024)	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang		d. Karakteristik Organisasi Pelaksana; e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik; dan f. Disposisi Pelaksana.	dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berhasil menurunkan angka prevalensi <i>stunting</i> dari 38,2 % menjadi 18,7 %.	teori, yakni Jones, Lineberry dan Lester & Stewart dengan fokus melihat keterlibatan peran dari beberapa OPD.
8.	Nama Peneliti: Michael Juarez Judul Penelitian: <i>Interventions to Reduce Child Stunting in Rural Guatemala: A Quality Improvement Model</i> Nama Jurnal: <i>International Journal of Environmental Research</i> Vol. 18 Issue. 73 Tahun: 2021 (Juarez, 2021)	Mengetahui jenis intervensi gizi yang diimplementasi kan pada pedesaan di Guatemala	Deskriptif Kualitatif	Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle: a. <i>Content of Policy</i>; dan b. <i>Context of Implementation</i>.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan intervensi gizi yang dilakukan di daerah pedesaan Guatemala diperlukan untuk menangani kekurangan gizi kronis yang tinggi. Faktor institusi dan rezim yang berkuasa merupakan faktor yang memengaruhi keberjalanan intervensi gizi berlangsung.	Penelitian internasional ini membahas mengenai implementasi intervensi gizi yang dipengaruhi oleh faktor rezim yang berkuasa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mencakup percepatan penurunan <i>stunting</i> dengan cakupan wilayah di Kelurahan Margomulyo.
9.	Nama Peneliti: Stephen R. Kodish Judul Penelitian: <i>Scaling Up Nutrition Movement in Order to Stunting Prevention from Rural Malawi</i> Nama Jurnal: <i>Food and Nutrition Journal</i> Vol. 43 Issue 1	Menganalisis implementasi kebijakan <i>Scaling Up Nutrition</i> (SUN) di daerah pedesaan Malawi dengan mengkombinasi	Korelasi Kuantitatif	Teori Peningkatan Keberhasilan Implementasi a. <i>Policy</i>; b. <i>Planning</i>; c. <i>Programming</i>; dan d. <i>Personel</i>.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan <i>Scaling Up Nutrition</i> dipengaruhi oleh kerangka program nasional yang terstruktur dengan baik, koordinasi yang andal, randangan program yang	Penelitian internasional ini membahas mengenai kebijakan peningkatan nutrisi untuk memberantas <i>stunting</i>, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui program orang tua asuh.

	Tahun: 2021 (Kodish, 2021)	kan kebijakan internasional dan nasional yang telah disesuaikan.			sistematis dan kapasitas gizi kesehatan masyarakat yang diperkuat.	
10.	Nama Peneliti: Arnaud Laillou Judul Penelitian: <i>Reducing Malnutrition in Cambodia: A Modelling Exercise to Prioritize Multisectoral Interventions</i> Nama Jurnal: <i>Public Policy, Maternal and Child Nutrition Journal</i> Tahun: 2022 (Laillou, 2022)	Mengetahui faktor-faktor penentu terhadap kekurangan gizi pada anak.	Deskriptif Kuantitatif	Model Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle: a. <i>Content of Policy</i> ; dan b. <i>Context of Implementation</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang kompleks antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> pada anak. Pendekatan terpadu, lintas sektoral, dan berfokus pada kesetaraan yang memperhatikan kualitas makanan anak-anak, kondisi air, sanitasi dan kebersihan, serta kemiskinan memberikan dampak terbesar dalam mencapai peningkatan lebih lanjut dalam status gizi di kalangan anak-anak Kamboja.	Penelitian internasional ini memprioritaskan penggabungan multisektor untuk menangani <i>stunting</i> , sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan melihat bagaimana masing-masing dari cakupan model implementasi dari faktor pendorong dan penghambat implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dijalankan dan menjadi faktor pendorong dan penghambat program upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kelurahan Margomulyo.

Sumber: diolah peneliti, 2024

Penelitian-penelitian terdahulu di atas memberikan landasan teoretis dan empiris yang relevan untuk mendukung penelitian tentang percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Ngawi. Berikut adalah analisis relevansinya:

1. **Penelitian oleh Supriyanto & Rahman (2023)**, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Fokus utamanya adalah pada standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan karakteristik pelaksana. Hasilnya menunjukkan kendala pada strategi implementasi dan faktor sosial-ekonomi.

Relevansinya, penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan penurunan *stunting* sangat bergantung pada faktor komunikasi dan sumber daya. Penelitian di Kelurahan Margomulyo dapat mengambil pelajaran dari pentingnya optimalisasi strategi implementasi dan memperhatikan faktor sosial-ekonomi masyarakat, sehingga intervensi dapat dirancang lebih kontekstual.

2. **Penelitian oleh Chairunnisa, dkk (2024)** fokus pada percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Brebes, penelitian ini menunjukkan masih adanya indikator yang belum tercapai. Model Van Meter dan Van Horn digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan.

Relevansinya, penelitian ini mendukung pentingnya integrasi lintas sektor dalam menangani *stunting*. Untuk Kelurahan Margomulyo, pendekatan terintegrasi dapat diterapkan melalui kolaborasi antar-OPD, PKK, dan

posyandu. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat menjadi lebih efektif karena melibatkan berbagai pihak di tingkat lokal.

3. **Penelitian oleh Sahroji, dkk. (2022)**, penelitian ini menilai implementasi kebijakan Dinas Kesehatan di Kabupaten Karawang dengan menyoroti pelaksanaan program dan dampaknya pada masyarakat. Kendala ditemukan pada implementasi program yang tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat.

Relevansinya, hasil penelitian ini mengingatkan perlunya program-program yang memberikan manfaat langsung kepada sasaran, terutama dalam percepatan pencegahan *stunting* di Kelurahan Margomulyo. Kebijakan yang akan diterapkan perlu memastikan bahwa intervensi bersifat tepat guna dan langsung menyentuh akar permasalahan.

4. **Penelitian oleh Sunaryo (2021)**, penelitian ini membahas implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Bandung saat pandemi Covid-19, dengan penekanan pada refocusing sumber daya.

Relevansinya, penelitian di Kelurahan Margomulyo dapat mengambil pembelajaran dari pentingnya efisiensi sumber daya dan alokasi anggaran yang berorientasi pada hasil. Pasca pandemi, fokus peningkatan kapasitas pelaksana dan pemberdayaan kader lokal menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan program *stunting*.

5. **Penelitian oleh Widyastuti, dkk. (2022)**, penelitian ini menekankan sinergi dalam pencegahan *stunting* melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Kabupaten Serang.

Relevansinya, penelitian ini menunjukkan pentingnya optimalisasi kelembagaan lokal seperti RDS untuk implementasi kebijakan yang berdaya guna. Kelurahan Margomulyo dapat mencontoh model ini dengan mengadopsi pendekatan berbasis komunitas yang fokus pada penguatan sumber daya lokal.

6. **Penelitian oleh Pakaya, dkk. (2023)**, menyoroti implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif di Kabupaten Gorontalo, penelitian ini menunjukkan pentingnya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Relevansinya, dalam konteks Kelurahan Margomulyo, temuan ini relevan untuk memperbaiki mekanisme koordinasi antar-OPD dan memperkuat struktur organisasi di tingkat lokal, seperti PKK, kader, dan perangkat kelurahan, guna mendukung kebijakan yang lebih terarah.

7. **Penelitian oleh Kiranasari (2024)**, penelitian ini menunjukkan keberhasilan Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Sintang dalam menurunkan prevalensi *stunting* secara signifikan melalui koordinasi lintas sektor.

Relevansinya, keberhasilan Sintang menjadi contoh nyata bagaimana koordinasi yang baik dan implementasi kebijakan yang terfokus dapat menurunkan angka *stunting*. Hal ini bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan sinergi antar instansi di Kelurahan Margomulyo.

8. **Penelitian oleh Juarez (2021), Kodish (2021), dan Laillou (2022):**

Penelitian internasional ini membahas intervensi gizi sensitif di berbagai negara. Fokusnya pada kebijakan lintas sektor, perencanaan program yang sistematis, dan konteks sosial-politik.

Relevansinya, Kelurahan Margomulyo dapat belajar dari pendekatan multisektor dan lintas institusi yang diterapkan di negara lain. Penguatan koordinasi dan kapasitas kader, bersama intervensi gizi yang berkelanjutan dapat mempercepat penurunan angka *stunting* secara signifikan.

Penelitian di Kelurahan Margomulyo dapat memanfaatkan hasil penelitian terdahulu dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendorong, seperti integrasi lintas sektor, sumber daya, komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Penggunaan gabungan teori implementasi kebijakan akan membantu dalam menganalisis dinamika lokal, sehingga kebijakan percepatan penurunan *stunting* dapat diterapkan secara lebih efektif.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (1987, dalam Keban 2014) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Keban juga menyatakan bahwa Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.

Administrasi publik awalnya muncul setelah adanya kata administrasi. Administrasi secara luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua

orang atau lebih untuk mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan. Proses pencarian identitas administrasi publik berlangsung hingga sekarang sesuai dalam perkembangan yang ada. Mulai dari awal kelahirannya, paradigma administrasi publik terus berkembang sesuai dengan fenomena yang terjadi.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Terdapat enam perubahan paradigma yang telah terjadi dalam administrasi publik. Disiplin ini telah mengalami evolusi melalui perubahan paradigma. Seperti yang dijelaskan oleh Kuhn (1970, dalam Winarno, 2020), paradigma dapat dianggap sebagai serangkaian pandangan, sikap, metode, prinsip dasar, atau pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang diterima oleh komunitas ilmiah dalam konteks tertentu (Soebarini, 2017). Ketika sebuah perspektif menghadapi hambatan eksternal atau mengalami krisis, kepercayaan terhadap perspektif tersebut akan menurun, mendorong individu untuk mencari sudut pandang yang lebih cocok atau bahkan menetapkan paradigma baru. Pergantian paradigma lama dengan yang baru telah mengalami beberapa kali krisis teoritis dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Nicholas Henry (1980, dalam Pasolong, 2020) menjelaskan bahwa terdapat enam paradigma administrasi publik, antara lain:

1) Paradigma Dikotomi Antara Politik Dan Administrasi (1900-1926)

Frank J. Goodnow, dalam tulisannya "*Political and Administration*" pada tahun 1900, menekankan pentingnya menjadikan pembuatan kebijakan sebagai prioritas dalam politik, yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat. Dia berpendapat bahwa politik dan administrasi harus dipisahkan

karena memiliki kepentingan yang berbeda, dan karenanya tidak dapat disatukan dalam satu disiplin. Woodrow Wilson juga menyatakan bahwa domain politik berbeda dengan domain administrasi, dengan politik berfokus pada perumusan tujuan negara, sementara administrasi berkaitan dengan pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut yang telah ditetapkan oleh para politisi.

Pernyataan ini didukung oleh pandangan Wilson dan Goodnow bahwa dalam tradisi politik Amerika Serikat pada saat itu, studi administrasi berkembang pesat, menganggap pemisahan politik dan administrasi sebagai bagian dari tradisi pemisahan kekuasaan, yang juga dikenal sebagai trias politika yang berlaku di AS. Mereka berpendapat bahwa keputusan dan pelaksanaan keputusan seharusnya dipisahkan, dengan politik dilihat sebagai proses pengambilan keputusan, sedangkan administrasi sebagai proses pelaksanaan. Proses administrasi dimulai setelah proses politik selesai, dan banyak yang berpendapat bahwa "administrasi dimulai ketika politik berakhir". Kedua aspek ini melibatkan aktor yang berbeda, terjadi dalam konteks yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda pula.

Terdapat dua pokok yang berbeda, yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi. Fokus ilmu politik hanya seputar permasalahan di pemerintah, kebijakan dan politik. Adapun fokus ilmu administrasi seputar permasalahan mengenai organisasi, karyawan atau pegawai, pemasukan dan pengeluaran dana dalam pemerintahan. Selanjutnya, untuk lokus administrasi negara di masa ini belum jelas.

2) Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Paradigma ini memiliki prinsip-prinsip administrasi dapat diterima secara umum bagi setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial dan budaya meskipun terdapat perbedaan budaya, visi, misi, dan lain-lain. Adapun lokus administrasi negara dalam paradigma ini bukan suatu masalah. Tokoh-tokoh berpengaruh dalam paradigma kedua administrasi publik, seperti Q.F. Willoughby, Gullick, dan Urwick, menekankan pentingnya prinsip administrasi dalam mengelola negara. Gullick dan Urwick memperkenalkan tujuh konsep yang dianggap bersifat universal dan relevan dalam berbagai konteks. Konsep-konsep tersebut meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan Staf, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran. Walau lokasi pasti dari kegiatan administratif ini belum ditentukan secara eksplisit, karena dipercayai bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara universal, termasuk dalam konteks lembaga pemerintahan.

3) Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma di fase ini berusaha mencari kejelasan mengenai kaitan antara administrasi negara dan ilmu politik. Paradigma ini berusaha untuk mencari titik terang mengenai kaitan yang ideal antara administrasi negara itu termasuk dalam ilmu politik. Pada paradigma ini telah terdapat dua kemajuan, yaitu studi kasus mulai digunakan, munculnya perbandingan dan paradigma administrasi yang menjadi bagian dari ilmu administrasi.

Awal mula terbentuknya paradigma ini terjadi Ketika Morstein-Marx, yang merupakan editor buku "*Elements of Public Administration*" pada tahun

1946, menantang pandangan tentang pemisahan politik dan administrasi yang terdapat dalam paradigma sebelumnya, menganggapnya tidak realistis dan sulit dicapai. John Gaus dengan tegas menyatakan bahwa teori administrasi publik pada dasarnya adalah cabang dari ilmu politik karena praktiknya membuktikan hal tersebut. Seiring perkembangannya, paradigma baru mulai muncul yang menafsirkan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik yang fokus pada birokrasi pemerintahan. Namun, konsep ini juga dianggap memiliki beberapa kelemahan.

4) Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)

Paradigma ini mengemukakan ilmu administrasi masih dianggap berada di bawah dari ilmu politik. Oleh karena itu, administrasi negara sudah tumbuh atau berkembang menjadi ilmu administrasi. Ilmu administrasi dalam paradigma ini hanya da fokus, tidak dengan lokus.Paradigma ini timbul karena ketidakpuasan terhadap gagasan bahwa akademisi dalam bidang administrasi negara dianggap sebagai warga negara kelas dua setelah mereka yang berfokus pada ilmu politik.

Akibatnya, mereka menyadari bahwa administrasi negara sebenarnya merupakan sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu administrasi. Sebagai paradigma baru, ilmu administrasi hanya fokus pada tahap awal. Paradigma ini menimbulkan kesadaran akan pentingnya meningkatkan penelitian dalam ilmu administrasi publik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari disiplin ilmu lainnya. Istilah ”publik” menjadi topik pembicaraan karena banyak yang salah mengartikannya. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi

negara menjadi lebih luas karena tidak hanya terbatas pada urusan birokrasi pemerintahan, tetapi juga melibatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, definisi administrasi negara dapat mencakup definisi administrasi swasta.

5) Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970)

Paradigma ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan paradigma sebelumnya karena fokus dan ruang lingkup administrasi publik menjadi lebih jelas. Dalam paradigma ini, pemisahan yang pernah ada antara ilmu politik dan ilmu administrasi, yang sebelumnya dianggap memiliki wewenang yang berbeda atau tidak terkait satu sama lain, telah tergantikan atau bahkan telah berkembang menjadi disiplin yang disebut Administrasi Publik.

Fokus utama dari administrasi publik meliputi teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan, ruang lingkungannya berpusat pada berbagai masalah dan urusan yang terkait. Administrasi negara sudah bisa masuk ke berbagai macam teori, seperti organisasi, kebijakan dan ekonomi politik. Selain itu, mulai banyak munculnya departemen, fakultas dan akademi administrasi negara.

6) Administrasi Publik dan Hal-Hal Publik (1990-Sekarang)

Menurut Waris, I. (2012), paradigma terkini menunjukkan bahwa semua paradigma sebelumnya berfokus pada pemerintah sebelum era pemerintahan. Administrasi publik lebih menitikberatkan pada sektor pemerintahan dan kurang memperhatikan keterlibatan sektor bisnis dan masyarakat dalam

menjalankan tanggung jawab pemerintah. Paradigma baru ini mengubah fokus dari kontrol eksklusif pemerintah terhadap urusan nasional dan kenegaraan menuju partisipasi berbagai pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaraan urusan bangsa dan negara (*Governance*). *Governance*, sebagai paradigma terkini dalam administrasi publik, mewakili pergeseran dari pendekatan tradisional yang berpusat pada pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah publik. *Governance* melibatkan partisipasi pemain non-pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dan menyelesaikan masalah publik. Tata kelola dipandang sebagai solusi untuk masalah buruknya pemerintahan yang menghambat efektivitas tugas-tugas pemerintah.

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam paradigma yang kelima karena ilmu administrasi publik sudah memberikan fokus dan lokus yang jelas. Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi, yang menjadi fokus adalah implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi dan lokusnya adalah di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan penjabaran dari para ahli di atas mengenai pengertian administrasi publik maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah dalam upaya mengelola dan mengoordinasikan sumber daya yang

ada dengan memformulasikan, mengimplementasikan dan pengawasan untuk mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan. Adapun tujuan tersebut merupakan hasil dari sikap responsif pemerintah dari adanya kebutuhan sosial yang ada. Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi, kebijakan iniditujukan untuk terus berupaya dalam mengelola dan mengoordinasikan sumber daya berupa penurunan angka atau kasus *stunting* pada balita.

Menurut Keban (2008) ruang lingkup administrasi publik hanya bergantung pada adanya fenomena yang ada di sekitar masyarakat bahkan cukup kompleks. Ruang lingkup yang terdapat dalam administrasi publik dapat dilihat dari enam dimensi strategis, yaitu:

- a. **Dimensi Kebijakan**, menjelaskan bagaimana proses perencanaan dan penentuan tujuan serta penentuan cara atau metode yang digunakan. Apabila digambarkan seperti cara kerja otak manusia yang memberikan tujuan atau arahan atas perilaku manusia.
- b. **Dimensi organisasi**, tentang pembentukan struktur organisasi dan menentukan wewenang dan tanggung jawab dari setiap unit atau anggota dalam upaya mencapai target atau tujuan. Jika digambarkan seperti halnya organ tubuh manusia yang menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak.
- c. **Dimensi manajemen**, mengenai proses melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Ini dapat dianalogikan dengan tubuh dan setiap organ manusia dalam menjalankan fungsinya dengan baik karena adanya peredaran darah dari jantung dan urat nadi.

- d. **Dimensi moral atau etika**, dimensi ini menjelaskan bagaimana memberikan bimbingan moral kepada administrator mengenai apa yang benar dan apa yang salah, atau hal baik dan hal buruk. Ini dianalogikan seperti halnya perasaan dan suasana hati yang dimiliki oleh manusia yang berfungsi untuk mengontrol diri manusia dan dapat memberikan peringatan.
- e. **Dimensi lingkungan**, aspek manajemen, kebijakan, tanggung jawab moral dan struktur organisasi dipengaruhi oleh bagaimana situasi dan keadaan hati seseorang. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan perkembangan dan pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh kondisi suhu atau iklim dan keadaan lingkungan
- f. **Dimensi akuntabilitas kinerja**, dimensi kelima dilaksanakan dengan profesional dan penuh tanggung jawab oleh administrator untuk memenuhi harapan yang telah diamanahkan atau dipercayakan dalam melayani publik. Dimensi ini menampakkan bukti nyata bagaimana seharusnya kehadiran dan peran administrasi publik dalam suatu negara. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dimensi akuntabilitas kinerja karena dalam upaya menurunkan kasus *stunting*, Kelurahan Margomulyo bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Kabupaten Ngawi merupakan pihak yang

keputusannya harus dapat melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi, aksi dan implementasi kebijakan dalam rangka menurunkan angka *stunting*. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, peran Kelurahan Margomulyo dan OPD lain di Kabupaten Ngawi menjadi hal yang vital dalam melakukan pencapaian tujuan. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya penurunan kasus balita *stunting* di Kelurahan Margomulyo tiap tahunnya tergantung dari kinerja Kelurahan Margomulyo dan OPD terkait dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi.

Teori administrasi publik digunakan dalam penelitian ini disebabkan oleh terdapat dalam ruang lingkup publik di mana dalam melaksanakan kegiatan di dalamnya terdapat tahap-tahap dan dimensi administrasi publik. Hal tersebut merupakan cara atau metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan penurunan *stunting* melalui implementasi kebijakan. Penelitian ini menjadi salah satu fokus dan lokus dari ilmu administrasi publik karena penelitian Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi dilaksanakan pada penyelenggara administrasi publik itu sendiri dan Kelurahan Margomulyo merupakan salah satu penyelenggara dari peristiwa atau fenomena ilmu administrasi publik, yaitu sebagai organisasi publik yang bersifat birokrasi publik.

1.6.4 Kebijakan Publik

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Kebijakan publik merupakan alat pengaturan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi urusan negara dalam penyelenggaraan negara. Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik memiliki peran penting dalam struktur negara. Ia mengungkapkan bahwa struktur negara terdiri dari lembaga pemerintahan (eksekutif), lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Faktor kedua adalah individu sebagai warga negara, sementara yang ketiga adalah daerah yang memiliki kedaulatan yang diakui. Komponen keempat adalah aspek kebijakan publik (Nugroho, 2011: 17–18).

Menurut Nugroho (2021), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; dan
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Easton (2018) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and*

practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi.

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”. Penelitian yang akan dibahas di sini mengenai kebijakan pemerintah Kelurahan Margomulyo dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* dengan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran, baik melalui intervensi gizi spesifik dan juga intervensi gizi sensitif. Upaya yang dilakukan dalam percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* melalui kegiatan-kegiatan Kemandirian Keluarga, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Gerakan 1000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan dan Posyandu. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bupati no. 4A Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Ngawi. Oleh karenanya penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya.

1.6.5 Tahapan Kebijakan

Kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik secara efektif dan efisien, termasuk masalah kekerasan. Proses pembentukan kebijakan publik melalui tahapan-tahapan yang terstruktur untuk menghasilkan kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu ahli

yang menjelaskan tahapan-tahapan tersebut adalah James Anderson (dalam Subarsono, 2005). Proses pembuatan kebijakan publik meliputi:

1. Perumusan Masalah: Identifikasi dan analisis berbagai masalah serta penyebabnya yang akan ditetapkan sebagai kebijakan;
2. Perumusan Kebijakan: Merumuskan alternatif solusi dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam perumusan kebijakan;
3. Penentuan Kebijakan: Identifikasi alternatif yang meliputi kriteria, pelaksanaan kebijakan, tindakan pelaksanaan, dan isi kebijakan;
4. Proses Implementasi: Pelaksanaan kebijakan yang melibatkan aktor yang terlibat, tindakan yang dilakukan, serta dampak dari kebijakan tersebut; dan
5. Evaluasi: Pengukuran pencapaian kebijakan, evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan, konsekuensi yang terjadi, dan langkah-langkah untuk mengubah atau membatalkan kebijakan jika diperlukan.

Kesuksesan suatu kebijakan dilihat dari setiap proses implementasinya dan harus dilakukan sesuai prosedur tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang dapat mempengaruhi hasil/produk kebijakan. Fokus penelitian ini terletak pada proses Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi, yang dilakukan oleh Kelurahan Margomulyo di wilayahnya.

1.6.6 Implementasi Kebijakan

Menurut Rodiyah et al. (2022), implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaannya akan sulit dilakukan. Implementasi kebijakan adalah tahap di

mana tujuan kebijakan akan terwujud apabila dilaksanakan secara optimal. Van Meter dan Van Horn (dalam Najikhah et al., 2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan tindakan yang diambil oleh aparat negara maupun swasta untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Najikhah et al., 2021) memaknai implementasi kebijakan dengan menitikberatkan pada pemahaman dampak yang ditimbulkan di masyarakat setelah kebijakan diberlakukan, baik dampak positif maupun negatif. Dengan demikian, implementasi dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat negara atau swasta untuk menjalankan produk kebijakan yang telah dirumuskan dengan tujuan menciptakan dampak bagi kelompok sasaran atau masyarakat. Sementara itu, Pressman dan Wildavsky (dalam Nafisa, dkk., 2023) menyatakan makna implementasi kebijakan adalah menjalankan kebijakan, memenuhi janji sesuai dokumen kebijakan, menghasilkan luaran sesuai tujuan kebijakan, serta mewujudkan tujuan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan adalah serangkaian langkah dan perbuatan yang dilaksanakan oleh lembaga publik ataupun swasta untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan melibatkan pertanyaan berupa apakah terdapat kesesuaian antara kebijakan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan di lapangan.

1.6.7 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan memiliki cakupan atas beberapa model yang dikemukakan dari berbagai ahli, berikut merupakan beberapa di antaranya:

1. George C. Edwards III

Implementasi kebijakan dapat terpengaruh oleh empat hal sebagai berikut (George C. Edwards III, dalam Siregar, 2022):

a. Komunikasi

Salah satu kunci kesuksesan implementasi kebijakan adalah para implementor kebijakan yang tahu dan paham secara persis yang harus mereka lakukan. Tujuan kebijakan perlu disampaikan dengan jelas kepada sasaran kebijakan untuk meminimalisir distorsi implementasi. Jika terdapat tidakjelasan tujuan kebijakan tujuan, bahkan tidak dipahami atau sama sekali tidak diketahui oleh sasaran kebijakan, maka dapat terjadi penolakan atau tidaksetujuan kelompok sasaran;

b. Sumber daya

Implementor kebijakan harus memiliki sumber daya yang memadai agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif;

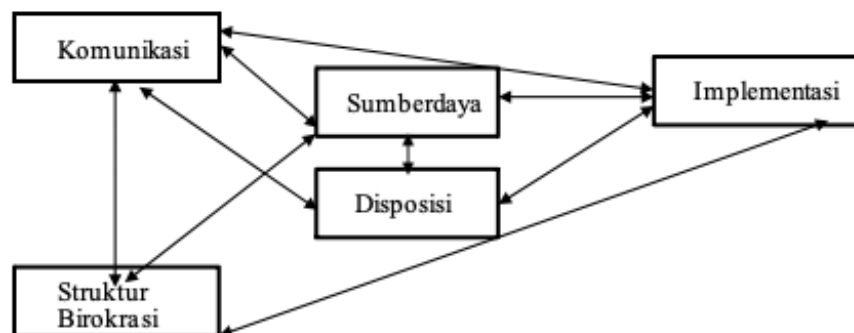
c. Disposisi atau Sikap-Sikap Pelaksana

Merujuk pada karakter dan watak implementor kebijakan, meliputi kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis. Apabila implementor kebijakan mempunyai disposisi yang baik, mereka akan mampu menerapkan kebijakan sebagaimana diharapkan dan diinginkan pembuat kebijakan; dan

d. Struktur birokrasi

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan ialah bagaimana lingkungan tempat *implementor* melaksanakan kebijakan memiliki pedoman untuk melaksanakan kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu kompleks cenderung dapat membuat pengawasan menjadi lemah dan menghambat fleksibilitas organisasi.

Gambar 1.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: Edward III (1980: 148) dalam Syahrudin (2018)

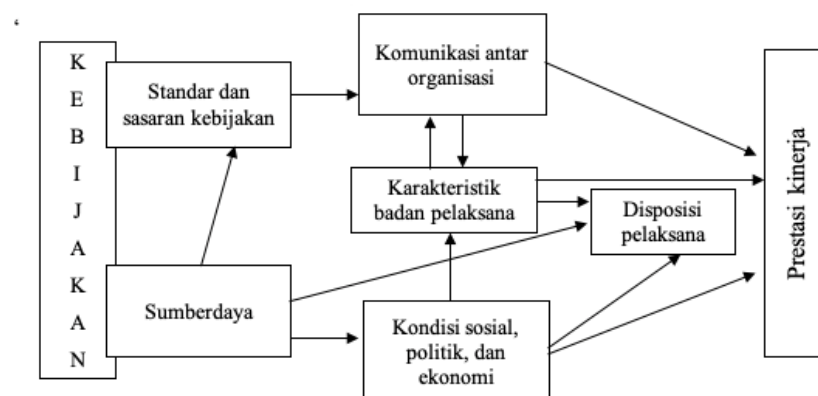
2. Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (1975, dalam Shauma & Purbaningrum, 2022) menyebutkan bahwasanya terdapat beberapa variabel yang dapat mendorong dan menghambat implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Ukuran kebijakan yang melihat bagaimana standar dan sasaran kebijakan yang ditetapkan;
- b. Sumber daya yang dengan melihat ketersediaan sumber daya yang dimiliki organisasi meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas penunjang;

- c. Karakteristik agen pelaksana mengacu pada organisasi formal dan informal yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) atau petunjuk teknis dalam setiap program dan ketaatan lembaga terhadap SOP tersebut sepanjang pelaksanaan kebijakan;
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas-aktivitas pelaksanaan, yang mengharuskan *implementor* kebijakan mengetahui hal-hal yang harus dikerjakan untuk mewujudkan tujuan implementasi, serta menjalin koordinasi yang tepat dengan pihak-pihak lain yang terlibat;
- e. Disposisi/Sikap Pelaksana adalah pengetahuan pelaksana, pemahaman terhadap isi dan tujuan kebijakan, serta sikap mereka terhadap kebijakan; dan
- f. Faktor sosial, politik, dan ekonomi mencakup penerimaan masyarakat terhadap program tersebut, keselarasan kebijakan pemerintah dengan tujuan program, dan kecukupan sumber daya finansial untuk pelaksanaannya.

Gambar 1.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn (1980: 148) dalam Syahrudin (2018)

3. Merilee S. Grindle

Model Merilee S. Grindle berfokus pada berbagai variabel untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan. Variabel-variabel tersebut meliputi isi kebijakan, lingkungan kebijakan, dan indikator keberhasilan seperti kesesuaian isi kebijakan dan konteks implementasi. apakah hal tersebut memfasilitasi keberhasilan suatu kebijakan.

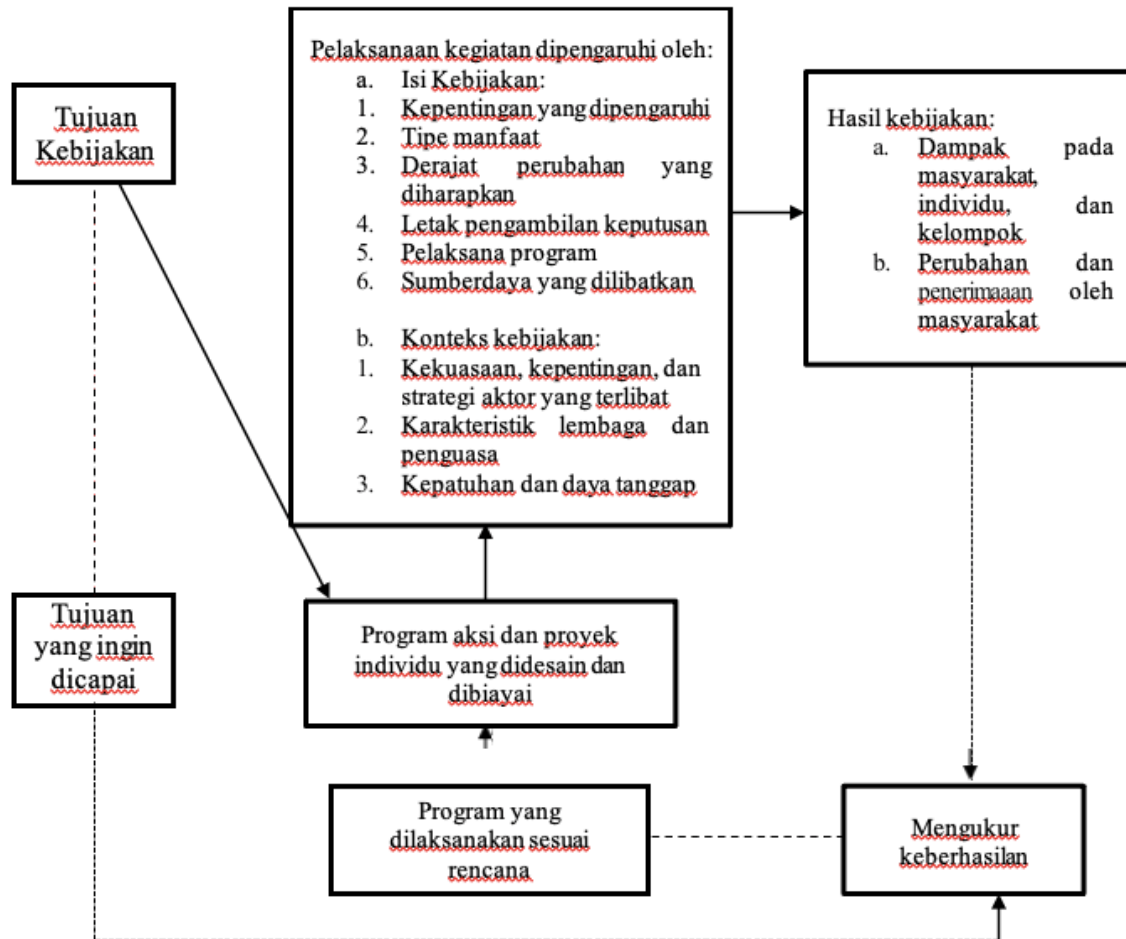
1. *Content of Policy*

- a) Kepentingan berdampak pada sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dimasukkan ke dalam kebijakan;
- b) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
- c) Besarnya perubahan yang diperlukan suatu kebijakan ditentukan oleh tujuannya. Substansi kebijakan harus mempunyai dimensi tersendiri;
- d) Lokasi dan pelaksanaan, menilai kesesuaian lokasi suatu program;
- e) Program yang ditunjuk akan dilaksanakan oleh individu yang berkualitas dan kompeten; dan
- f) Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan suatu proyek.

2. *Context of Implementation*

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut, seberapa besar kekuatan, kepentingan, serta upaya dari aktor dalam penyelenggaraan program;
- b) Atribut institusi dan sistem pemerintahan;
- c) Tingkatan kepatuhan dan penerimaan kelompok sasaran;

Gambar 1.4 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle



Sumber: Grindle (1980: 148) dalam Syahrudin (2018)

4. Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan model *top-down*, yang melihat implementasi dari kerangka analisisnya dan menemukan bahwa kesuksesan penyelenggaraan ditentukan oleh 3 grup variabel: karakteristik masalah, karakteristik peraturan/regulasi, dan karakteristik lingkungan.

1. Karakteristik masalah

- a) Dukungan teori dan teknologi

Indikator tersebut berkaitan dengan mudah tidaknya mengendalikan masalah. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat kesulitan teknis dan keterkaitan masalah.

b) Keragaman perilaku kelompok sasaran

Maksudnya adalah kelompok sasaran masyarakat yang bersifat homogen atau heterogen mempengaruhi tingkat kesulitan dan kemudahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

c) Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki

Suatu program kebijakan yang memiliki tujuan untuk memberi pengetahuan cenderung lebih sederhana untuk diterapkan dibandingkan program kebijakan yang berorientasi mengubah sikap manusia.

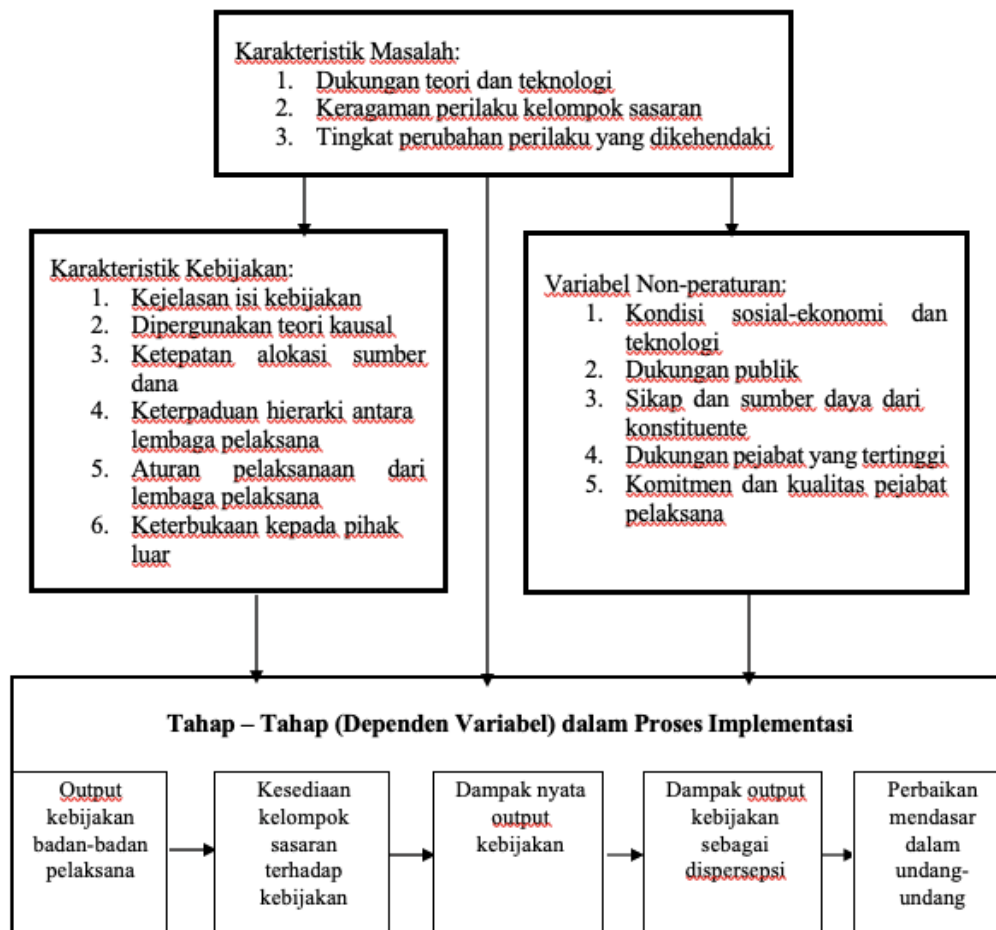
2. Karakteristik Kebijakan

Kejelasan substansi kebijakan memudahkan proses pelaksanaan sehingga memudahkan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan harus didukung oleh landasan teoritis yang kuat. Distribusi uang tunai yang tepat untuk mendukung program. Integrasi hierarki antar lembaga pelaksana mengacu pada tingkat hubungan dan dukungan di antara lembaga-lembaga tersebut. Memastikan peraturan yang jelas dan konsisten di lembaga pelaksana. Dedikasi pihak berwenang terhadap tujuan kebijakan. Memfasilitasi akses dan keterbukaan terhadap pihak eksternal dan organisasi masyarakat harus dilakukan secara sederhana dan ekstensif.

3. Karakteristik lingkungan

Variabel eksternal yang mempengaruhi proses penyelenggaraan mencakup faktor sosio-ekonomi dan teknologi. Masyarakat yang berpendidikan dan terbuka terhadap dunia luar cenderung lebih berterima dengan modernisasi dan globalisasi dibandingkan masyarakat yang tertutup. Dukungan masyarakat pada inisiatif kebijakan. Pendapat kelompok konstituen berdampak pada implementasi kebijakan melalui intervensi dalam pengambilan keputusan. Terakhir, tingkatan komitmen dan keterampilan dari aparat serta pelaksana.

Gambar 1.5 Model Implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier



Sumber: Mazmanian dan Sabatier (1975) dalam Syahrudin (2018)

Tabel 1.5 Tabel Komparasi Implementasi Menurut George Edward III, Van Metter dan Van Horn, Merilee S. Grindle dan Mazmanian dan Sabatier

George Edward III	Van Metter dan Van Horn	Merilee S. Grindle	Mazmanian dan Sabatier
1. Komunikasi	1. Standar dan Sasaran Kebijakan	1. <i>Content of Policy</i> a. Kepentingan yang dipengaruhi b. Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran c. Derajat perubahan dari sebuah kebijakan d. Lokasi dan implementasi e. Pelaksanaan program yang ditunjuk f. Sumber daya	1. Karakteristik masalah a. Dukungan teori dan teknologi b. Keragaman perilaku kelompok sasaran c. Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki
2. Sumber Daya	2. Sumber Daya Kebijakan	2. <i>Context of Policy</i> a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran	2. Karakteristik Kebijakan a. Kejelasan isi kebijakan b. Teori kausal c. Ketepatan sumber dana d. Keterpaduan hierarki antara lembaga pelaksana e. Aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana f. Keterbukaan kepada pihak luar
3. Disposisi	3. Komunikasi Antar Organisasi		3. Variabel lingkungan kebijakan

4. Stuktur Birokrasi	4. Karakteristik Agen Pelaksana		a. Faktor sosial, politik dan ekonomi b. Dukungan publik c. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparatur serta implementor
	5. Sikap Pelaksana		
	6. Faktor Sosial, Politik dan Ekonomi		

Sumber: diolah peneliti, 2024

Peneliti telah mengidentifikasi dimensi umum yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan *top-down* dan model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana dan lingkungan kebijakan. Teori ini digunakan untuk mengetahui apakah program telah mencapai dampak yang maksimal atau sebaliknya di tingkat lokal. *Metode top-down* berfokus pada seberapa baik pelaksana mengikuti proses dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat. Program percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo membutuhkan koordinasi berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Model Van Meter dan Van Horn dipilih karena menekankan pentingnya koordinasi antar organisasi yang menjadi kunci dalam implementasi kebijakan terintegrasi

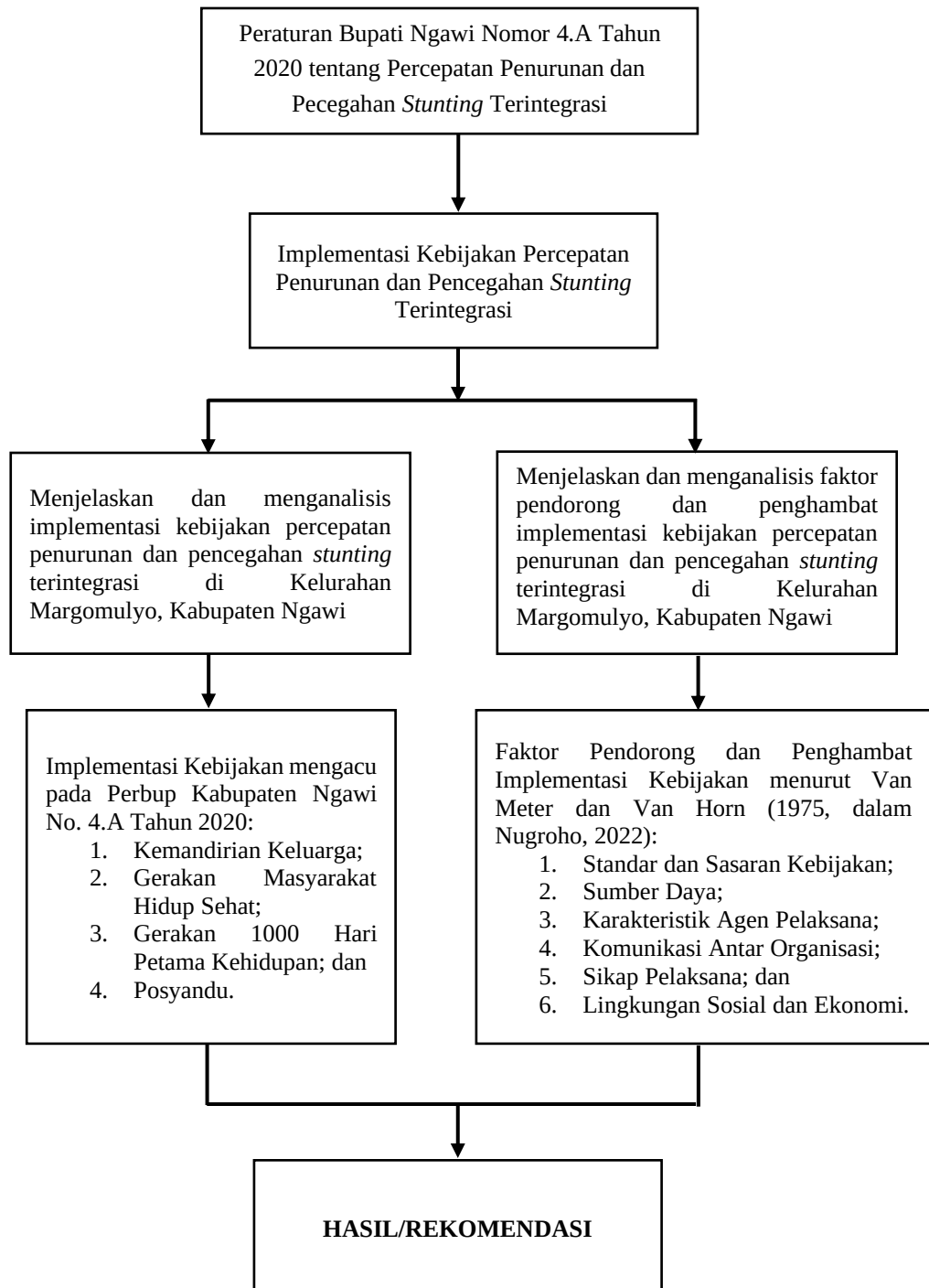
1.6.8 *Stunting*

Menurut WHO (2015), secara umum *stunting* merupakan permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, *stunting* mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun.

Seiring berjalannya waktu, *stunting* mengalami perubahan definisi. Pada tahun 2015, WHO menyatakan *stunting* didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO pada tahun 2020 *stunting* mengalami perubahan yang dapat didefinisikan sebagai kondisi pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

1.7 Kerangka Pikir

Gambar 1. 5 Kerangka Pikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi

Implementasi merupakan aktivitas dalam melaksanakan kebijakan kepada masyarakat dengan harapan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi mengacu pada Peraturan Bupati Ngawi 4.A Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Beberapa fenomena yang akan diteliti dengan berdasarkan pasal-pasal dalam regulasi, yaitu:

1. Kemandirian keluarga

Kemandirian keluarga adalah kemampuan keluarga untuk secara mandiri menerapkan kebiasaan sehat dan memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga khususnya ibu hamil, menyusui dan balita tanpa tergantung pada bantuan eksternal secara terus menerus. Dalam konteks upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi, kemandirian keluarga menjadi kunci karena peran aktif keluarga dalam menjaga kesehatan, pola makan dan lingkungan yang bersih yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Melalui kemandirian keluarga dapat diketahui dengan mengamati gejala-gejala berikut:

- a. Pengetahuan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan gizi;
- b. Pengetahuan terhadap gangguan kesehatan dan gizi; dan
- c. Pemanfaatan layanan kesehatan yang ada.

2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Upaya bersama untuk mendorong pola hidup sehat di masyarakat dengan tindakan nyata yang membutuhkan partisipasi aktif individu, keluarga dan komunitas supaya kesehatan masyarakat meningkat dan angka penyakit bisa ditekan, dapat diketahui dengan mengamati gejala-gejala berikut:

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. Percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
- d. Peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

3. Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan

Upaya untuk memastikan anak mendapatkan asupan gizi dan perawatan terbaik sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ini penting karena masa ini menentukan tumbuh kembang optimal anak dan mencegah *stunting*. Gerakan ini melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam memastikan anak mendapat nutrisi cukup, ASI eksklusif, imunisasi, serta stimulasi perkembangan yang baik.

Gerakan 1000 HPK dapat diketahui dengan mengamati gejala-gejala berikut:

- a. Pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil kurang energi kronis (KEK);
- b. Pemberian tablet tambah darah dan *asam folat*;
- c. Pemberian obat cacing pada ibu hamil;
- d. Perlindungan ibu hamil dari penyakit menular;
- e. Dorongan inisiasi menyusui dini (IMD) bagi ibu melahirkan;
- f. Gerakan pemberian air susu ibu eksklusif;
- g. Dorongan kelanjutan pemberian ASI sampai 23 bulan dan pemberian makanan pendamping ASI;
- h. Pemberian imunisasi lengkap; dan
- i. Pencegahan dan pengobatan diare.

1.8.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi

Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan merujuk pada suatu kondisi yang dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi, faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan dapat diketahui dengan mengamati gejala-gejala berikut ini:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan Sasaran Kebijakan adalah acuan dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan. Gejala yang diamati, yaitu:

- a. Terwujudnya konvergensi program dalam penurunan dan pencegahan *stunting*.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah keterkaitan apakah implementasi kebijakan sudah mendapat alokasi-alokasi yang sesuai. Gejala yang diamati, yaitu:

- a. ketersediaan alokasi sumber daya manusia (*staff*);
- b. ketersediaan alokasi anggaran (*budgetary*); dan
- c. ketersediaan alokasi fasilitas penunjang (*facility*).

3. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah faktor yang melihat apakah aktor kebijakan sudah tepat dengan masalah yang akan diselesaikan. Gejala yang diamati, yaitu:

- a. struktur birokrasi

4. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan interaksi suatu organisasi dengan organisasi lainnya dalam menjalankan suatu kebijakan. Gejala yang diamati, yaitu:

- a. konsistensi penyaluran informasi; dan
- b. keseragaman informasi yang disalurkan.

5. Sikap pelaksana

Sikap Pelaksana adalah pemahaman pelaksana kebijakan terhadap isi dan tujuan kebijakan. Gejala yang diamati, yaitu

- a. Tugas dan kontribusi pelaksana

6. Lingkungan

Lingkungan adalah aspek-aspek dari perspektif masyarakat terhadap program yang dijalankan dan keselarasan kebijakan pemerintah dengan tujuan program. Gejala yang diamati, yaitu:

- a. aspek sosial; dan
- b. aspek ekonomi.

1.8.3 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 6 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
1	Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi	Kemandirian Keluarga	Pengetahuan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan gizi
			Pengetahuan terhadap gangguan kesehatan dan gizi
			Pemanfaatan layanan kesehatan yang ada
		Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Peningkatan aktivitas fisik
			Peningkatan perilaku hidup sehat
			Percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat
			Peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit
			Peningkatan kualitas lingkungan
			Peningkatan edukasi hidup sehat
		Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan	Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis
			Pemberian tablet tambah darah dan asam folat
			Pemberian obat cacing pada ibu hamil
			Perlindungan ibu hamil dari penyakit menular
			Dorongan inisiasi menyusui dini bagi ibu melahirkan
			Gerakan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
			Dorongan kelanjutan pemberian ASI sampai 23 bulan dan pemberian makanan pendamping ASI
			Pemberian imunisasi lengkap

			Pencegahan dan pengobatan diare
2	Faktor Pendorong dan Penghambat	Standar dan Sasaran Kebijakan	Terwujudnya konvergensi program dalam penurunan dan pencegahan <i>stunting</i>
		Sumber Daya	Sumber Daya Manusia
			Sumber Daya Anggaran
			Fasilitas Penunjang
		Karakteristik Agen Pelaksana	Struktur Birokrasi
		Komunikasi Antar Organisasi	Konsistensi penyaluran Informasi
			Keseragaman informasi yang disalurkan
		Sikap Pelaksana	Tugas dan kontribusi pelaksana
		Lingkungan	Aspek Sosial
			Aspek Ekonomi

Sumber: diolah peneliti, 2024

1.9 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 2) bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013: 153) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu.

Penelitian kualitatif menurut Koentjaraningrat (1993: 89) mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format *grounded research*. Penelitian kualitatif salah satu penelitian yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak berpola. Pendapat Moleong senada

dengan Bogdan dan Taylor (1975), dimana mereka mengartikan bahwasanya penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail.

1.9.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena ingin menjelaskan atau mendeskripsikan setiap informasi yang ada. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya untuk mengartikan atau menjelaskan maksud dari gejala-gejala yang terjadi dengan menggunakan semua cara yang ada dalam penelitian kualitatif. Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Desain penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mencatat, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan keadaan yang terjadi atau ada. Desain ini, kemudian digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus dalam penelitian ini mengacu pada tempat penelitian akan dilakukan. Peneliti memilih lokus penelitian di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi berdasarkan kepada data yang menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus balita *stunting* yang terjadi pada kelurahan ini. Kemudian, fokus dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi; dan
2. melakukan analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan data atau informasi, sehingga memerlukan informan. Informan merupakan seseorang atau individu maupun kelompok yang memberitahukan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan cara mengambil sampel sumber data menggunakan karakteristik tertentu dimana informan telah menguasai permasalahan, mempunyai basis data yang kuat dan akurat, serta dapat menjawab pertanyaan dengan valid. Kemudian, teknik selanjutnya ialah *snowball*, yaitu metode pengambilan sampel yang memiliki probabilitas sama ketika dipilih menjadi bagian dari sampel:

Tabel 1. 7 Informan Penelitian

No.	Informan	Teknik Pemilihan	Jumlah
1.	Technical Assistant Satgas Stunting DP3AKB Kabupaten Ngawi	Purposive Sampling	1
2.	Lurah Kelurahan Margomulyo	Purposive Sampling	1

3.	Ketua Tim Percepatan Penanganan <i>Stunting</i> Kelurahan Margomulyo	<i>Purposive Sampling</i>	1
4.	Kader TPK Puskesmas Kelurahan Margomulyo	<i>Purposive Sampling</i>	1
5.	Orang Tua Balita <i>Stunting</i>	<i>Purposive Sampling</i>	2
Jumlah			6

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini mengacu pada dua jenis data, yakni:

- a. Data Kualitatif, dalam penelitian ini berbentuk kata, pemetaan, dan gambar. Data kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat fokus penelitian dengan mengamati saksama fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi secara lebih mendalam yang hasilnya kemudian akan dianalisis dan disajikan melalui narasi deskriptif.
- b. Data Kuantitatif, dalam penelitian ini terdapat data yang berbentuk angka atau data yang kemudian akan disajikan secara angka.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara dengan informan dapat dilakukan sebagai orang yang mengetahui informasi mengenai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian secara langsung.

- b. Data Sekunder

Pasolong (2020) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari tempat penelitian.

Data tersebut tidak langsung didapat dari sumbernya melainkan dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti tinjauan pustaka, dokumen, surat kabar, dan jurnal-jurnal.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Seorang peneliti melalui observasi mengamati tingkah laku atau perilaku dan maksud dari tingkah laku tersebut (Marshall, 1995 dalam Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data dengan observasi perlu dilakukan jika penelitian membahas tentang tingkah laku manusia atau digunakan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang tidak dijelaskan dalam wawancara atau supaya memperkuat jawaban dari informan sehingga memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan cara mengadakan sesi tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung untuk saling bertukar informasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui keadaan dan gejala yang terjadi dapat diketahui dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan partisipan yang menjalankan kegiatan (Stainback, 1988 dalam Sugiyono, 2014).

c. Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melengkapi informasi dari metode observasi dan wawancara dalam bentuk

tulisan, gambar atau karya orang lain. Sebab, hasil penelitian akan lebih bisa dipercaya apabila dilengkapi dengan foto-foto atau karya tulis akademik.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelola, mengolah, menyusun, mengorganisasikan semua data yang diperoleh dalam suatu pola atau kategori sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Peneliti ketika dalam melakukan wawancara menganalisa terhadap jawaban dari informan dan apabila jawaban dirasa kurang memuaskan akan diberikan pertanyaan lagi sehingga diperoleh data yang benar, begitu juga dengan catatan dari pengamatan di lapangan dan dokumen yang diperoleh. Selanjutnya, data tersebut dianalisis hingga data-data tersebut dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman dengan melakukan tiga tahapan, antara lain:

a. Reduksi data

Semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dokumen akan direduksi dengan mengumpulkan, memilah mengolah data tersebut supaya dapat memberikan gambaran lebih spesifik. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok atau penting. Peneliti dapat melihat dengan jelas fenomena yang terjadi sehingga mempermudah dalam melakukan penyajian data dan mengetahui kekurangan data yang mungkin diperlukan.

b. Penyajian data

Dalam menyajikan data biasanya dengan menggunakan kalimat pemaparan atau penjelasan (Miles dan Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2014). Menyajikan data atau menampilkan data dapat menggunakan suatu tabel, grafik, bagan dan lain-lain supaya mudah untuk dipahami sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Setelah memahami pola dari model penyajian data maka langkah selanjutnya dengan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Metode ketiga dalam analisis data kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila data yang ada belum kuat maka kesimpulan yang dilakukan masih sementara. Apabila data yang diperoleh sudah kuat maka kesimpulan tersebut sudah valid atau teruji.

1.9.7 Kualitas Data dan Validitas Data

Uji kebenaran atau keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas data penelitian sudah baik. Menurut (Gibbs, 2007 dalam Creswell 2010) validitas kualitatif merupakan proses pemeriksaan ketepatan atau keabsahan hasil penelitian dengan menggunakan metode tertentu. Dalam penelitian ini, dalam menguji kualitas data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara yang digunakan untuk mengecek keabsahan data dari data yang diperoleh sewaktu pengumpulan dan analisis data dengan melihat dari berbagai sudut pandang yang bertujuan untuk mengurangi bias pada data. Selanjutnya, menurut Sugiyono (2014) terdapat tiga macam triangulasi, antara lain:

1. Triangulasi sumber, melihat keabsahan data yang diperoleh data dari berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik, melihat keabsahan data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, melihat keabsahan data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan waktu yang berbeda.

Berdasarkan ketiga macam tringulasi di atas, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tringulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi akan melakukan teknik wawancara dengan beberapa informan sehingga data yang diperoleh menjadi kredibel karena bisa melihat suatu fenomena dari sudut pandang yang berbeda.

Wawancara akan dilakukan pada *Technical Assistant* Satgas *Stunting* DP3AKB Kabupaten Ngawi, Kepala Kelurahan Margomulyo, Ketua TPPS Kelurahan Margomulyo, Kader TPK dan Orang Tua Balita *Stunting*. Selain itu, untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dari teknik wawancara, peneliti juga akan menggunakan observasi atau dokumen sehingga kualitas data yang diperoleh semakin kredibel dan akan meningkatkan validitas data.